



Pemerintah Kota Bengkulu

**Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah**

**LKJIP
2024**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan visi yang hendak dicapai adalah : *“Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kota Bengkulu menuju masyarakat yang aman, tertib, dan dinamis”*.

Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai walau pun belum optimal. Kegiatan - kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan pencapaian sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masih kurang.

Tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bengkulu tahun 2024 telah dilaksanakan dengan anggaran tahun 2024 dan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu sebesar RP. 36.659.317.746 dari pagu anggaran Rp. 38.509.770.842 atau mencapai 95,19 % dari jumlah pagu anggarannya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain: minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, kurangnya sarana dan prasarana. Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya – upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, pertama gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor ada agar Pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik dan optimal.

3. Arah kebijakan anggaran harus di fokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas / LSM, Partai Politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan kerja.

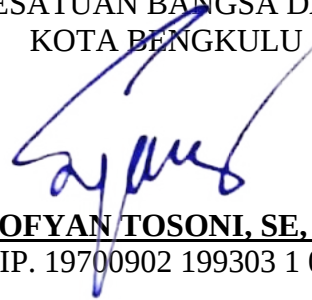
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkahnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai Implementasi dari Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substatif Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu ini merupakan media pertanggungjawaban yang di buat secara periodik yang berisikan informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Demikian Laporan Akutanbilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu semoga berguna dan bermanfaat sebagaimana bahan informasi untuk semua pihak yang memerlukan serta mampu memberi aspirasi kepada Badan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu agar menjadi lebih baik lagi.

Bengkulu, 28 Februari 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BENGKULU



SYOFYAN TOSONI, SE, MM
NIP. 19700902 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Gambaran Organisasi	5
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANA KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024	19
2.4 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja organisasi	23
3.2 Pengukuran Kinerja	26
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Solusi	28
3.5 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memberikan kewajiban tentang pedoman bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang diawali dengan penyusunan perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2024 penjabaran visi misi dan program kerja pembangunan yang menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pencapaian.

Penyusunan LKJIP ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana alam dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah kota Bengkulu dengan demikian materi laporan sedikit banyak mencakup bidang hukum ketentraman ketertiban kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain secara strategis berkaitan dengan tugas pokok fungsi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu masalah sosial dan politik serta bencana alam maksud dan tujuan pembukaan pembuatan LKJIP adalah untuk pertanggungjawaban dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil hasil kegiatan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu selama tahun 2024 dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya.

1.2 Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Kota Bengkulu Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53 tambahan lembaran negara Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 tambahan lembaran negara nomor 4421).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Peraturan menteri negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per /09 /M.PAN /5 /2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Peningkatan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu.

11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu.
13. Peraturan walikota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2024.
15. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

1.3 Isu Strategis

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Bengkulu yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Bengkulu merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu yaitu mengantisipasi berbagai kerawanan sosial, politik yang berdampak pada gangguan keamanan

dan ketertiban masyarakat serta memiliki visi sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Bengkulu yang aman, nyaman dan tenteram dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya. Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkuat keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Kota Bengkulu merupakan kota yang terbuka, sehingga banyaknya penduduk mendatang dan mobilitas penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban di perkotaan sebagian besar diakibatkan oleh adanya ketidakdisiplinan warga kota terhadap tatanan kehidupan seperti administrasi kependudukan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap tata ruang, pelanggaran dalam bidang bangunan, tempat usaha maupun yang lainnya sehingga menimbulkan kesemrautan kota. Adapun isu strategis di bidang pelayanan keamanan dan ketertiban kota antara lain :

1. Peningkatan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga untuk dapat beraktivitas.
2. Peningkatan jaminan rasa aman dengan memperluas partisipasi semua pihak untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban umum;
3. Peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, dan semua stakeholder yang terkait dalam mengatasi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di lingkungan masing – masing.

1.4 Gambaran Organisasi.

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan kesatuan bangsa dan politik masuk pada urusan pemerintahan umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tetap merupakan OPD Kota Bengkulu di bawah Walikota Bengkulu, sampai dengan peraturan tersebut diatas di undangkan. Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu berpayung pada dua Peraturan Daerah Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu hanya melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

Sebagai berikut:

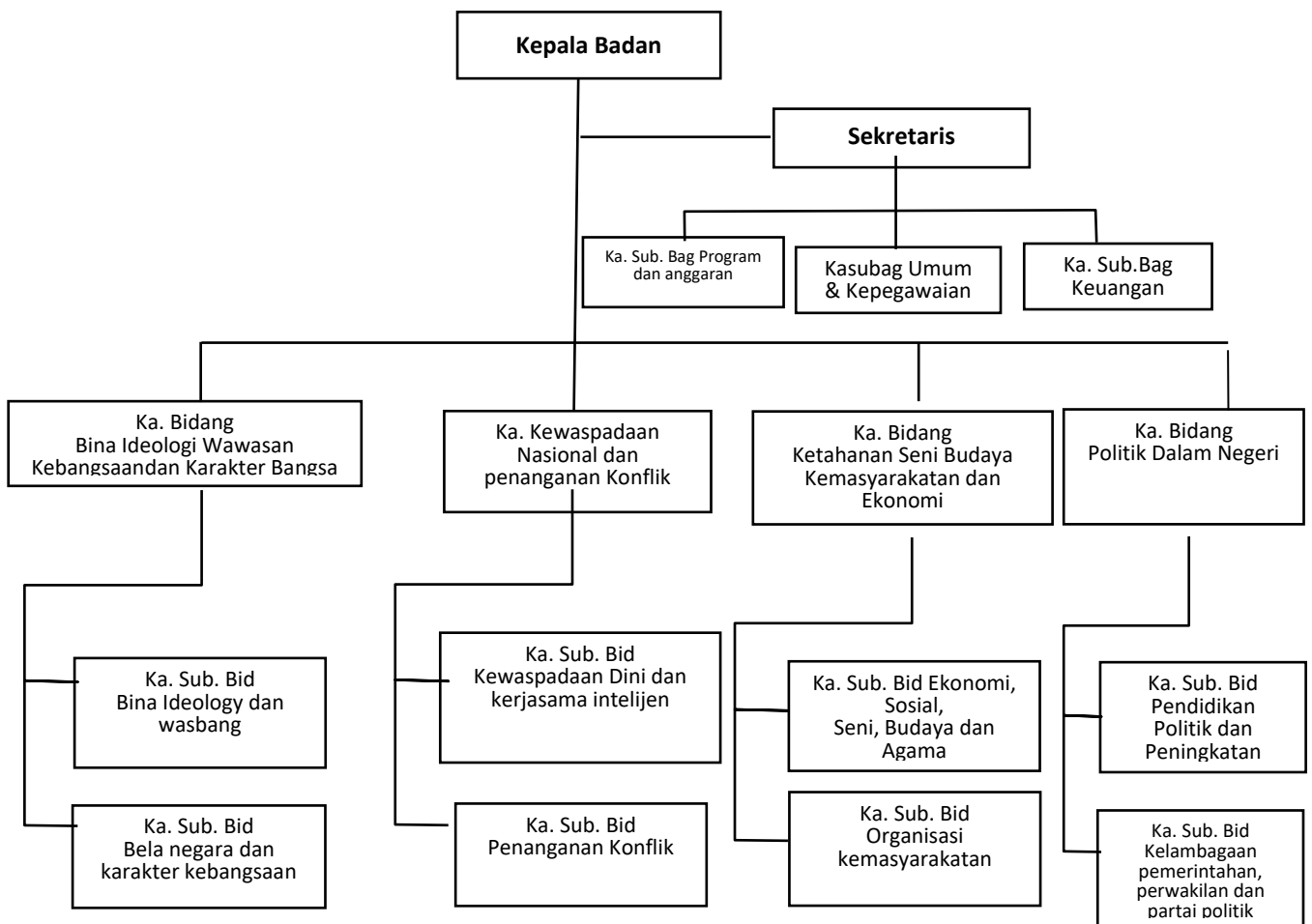
1. Pelaksanaan penyusunan program, penyelenggaraan ketatausahaan badan.
2. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan Ekonomi dan Politik.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Nasional, Ketahanan, Seni, Budaya, Ekonomi, dan Politik.

4. Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan kepada nasional ketahanan seni budaya agama masyarakat ekonomi dan politik.
5. Penetapan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan, Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi Dan Politik.
6. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 Struktur Organisasi



Keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu berjalan sebagaimana tupoksi dari masing-masing bidang ditunjang dengan staf sebagai pendukung kelancaran tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu pada tahun 2024.

Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bengkulu berjumlah 26 Orang terdiri dari

PNS 24 Orang.

Pegawai Honor 4 Orang.

Data PNS Menurut Pangkat/Golongan Dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LK	PR	
1	Juru Muda	I/a	-	-	-
2	Juru Muda TK.I	I/b	-	-	-
3	Juru	I/c	-	-	-
4	Juru TK.I	I/d	-	-	-
5	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
6	Pengatur Muda TK.I	II/b	1	-	1
7	Pengatur	II/c	-	-	-
8	pengatur TK.I	II/d	-	-	-
9	Penata Muda	III/a	-	-	-
10	Penata Muda TK.I	III/b	3	-	3
11	Penata	III/c	1	-	1
12	Penata TK.I	III/d	8	6	14
13	Pembina	IV/a	2	1	3
14	Pembina TK.I	IV/b	1	-	1
15	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	1
16	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
17	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
JUMLAH			16	7	23

Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	SLTA/MAN/SMK	1	-	1
2	D.III	-	-	-
3	S1	14	7	21
4	S2	1	0	1
JUMLAH		16	7	23

Daftar Nama-Nama Pejabat Eselon II, III, IV Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

1. Nama : Syofyan Tosoni, SE, MM
NIP : 19700902199303 1 006
Pangkat/Gol : Pembina / (IV.c)
Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu
2. Nama : Budi Antoni, SE. M.Si
NIP : 19792192006041014
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III.d)
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu
3. Nama : Tefy Susanto, S.SOS
NIP : 19820316 200012 1 004
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi
4. Nama : Kasma Aiti, SP
NIP : 19731126 200804 2 007
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
5. Nama : Rosdiana, SE, M.Si
NIP : 19730304 200804 2 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV.a)
Jabatan : Kepala Bidang Politik
6. Nama : Dra. Fenny Fahrianny
NIP : 196709041986112001
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III.d)
Jabatan : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

-
7. Nama : Erliana Hastuti, SS, M.Si
NIP : 19760614 201101 2 007
Pangkat/Gol : Penata / (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Program
8. Nama : Ratna Puspita Sari, SE
NIP : 197806192002122009
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
9. Nama : Wahyudi Surahmat, SE
NIP : 19790613010011012
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Tata Usaha
10. Nama : Dedi Azhari, S.IP
NIP : 19780422202421006
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bid. Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
11. Nama : Hasri Juliantoni, S.KOM
NIP : 197207201999031004
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
12. Nama : Indra Ramadan, SE
NIP : 198612072006021002
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Bina Ideologi
13. Nama : Lizahari Adios, S.Sos
NIP : 197207101994031006
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Wawasan Kebangsaan

-
14. Nama : Dedi Dahmudi, SE
NIP : 197412042002121005
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penanganan Konflik.
15. Nama : Dra. Dewi Efrianna
NIP : 196804211994022002
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
16. Nama : Defi Murtian
NIP : 197612281996031002
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
17. Nama : Fanny Yolanda, SE
NIP : 198310112006042006
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Umum.
18. Nama : Iryana, S.Sos
NIP : 196907051997032005
Pangkat/Gol : Pembina / (IV.a)
Jabatan : Analis Wawasan Kebangsaan
19. Nama : Eta Yuliarti, SE
NIP : 197603072007011010
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Pengelola data

20. Nama : Pery Gunawan, S.Sos
NIP : 197702192007011003
Pangkat/Gol : Penata TK.I / (III/d)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
21. Nama : Sarman, S.Ip
NIP : 197011272007011005
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III.b)
Jabatan : Pengelola Data.
22. Nama : Budi Zulman Ansyari, ST
NIP : 198110102009031003
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III.b)
Jabatan : Pengelola Data.
23. Nama : Yobbi Suhevan
NIP : 199005012010011001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda, TK.I (II.b)
Jabatan : Pengadministrasi Partai
24. Nama : Beni Wahyudi
Pangkat/Gol : PTT
25. Nama : Andryko Alldino
Pangkat/Gol : PTT
26. Nama : Sahro Dian Iskandar
Pangkat/Gol : PTT
27. Nama : Nevy Aprilia, S.Psi
Pangkat/Gol : PTT

1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Bengkulu. Dengan pola pikir seperti itu, Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

IKTHISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Tahun 2024.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Eselon II
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
3. Rencana Aksi Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia dengan adalah suatu proses yang terarah pada hasil yang di ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2019-2024) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: **“Kota Bengkulu Yang Bahagia dan Religius, APBD Untuk Rakyat”** Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan 4 (Empat) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan.
3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berahlak Mulia.
4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha Yang Kondusif.

Sedangkan dari penjabaran dari misi, yang sesuai dengan bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah misi yang ke- 1 (Satu) yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Bengkulu 2019-2024 tersebut, yang sesuai dengan pembangunan di

bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah : Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke- 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**

Tujuannya: Meningkatnya Kohesivitas Masyarakat

Sasarannya: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dari visi dan misi tersebut maka ada kesesuaian antara visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD dengan visi dan misi Badan Kesbangpol Kota Bengkulu dalam lima tahun ke depan yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kota Bengkulu Yang Berwawasan Kebangsaan, Rukun, Kondusif dan Demokratis”** khususnya indikator penjabaran visi bahagia dan religius, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, terciptanya hubungan antar masyarakat Kota Bengkulu yang dinamis, saling menghargai, gotong royong, dan *tenggang rasa*. Untuk mewujudkan visi maka misi yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pendaftaran Organisasi Masyarakat (Ormas).
3. Meningkatkan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras serta golongan lainnya.
4. Mewujudkan masyarakat yang aman, kondusif dan demokratis.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tahun 2019-2024 yang menguraikan visi dan misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator kinerja sasaran, Arah Kebijakan dan memuat seluruh program yang akan menjadi acuan rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan serta memuat capaian target kinerja setiap tahun. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tahun 2019 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.1
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	%	5	7	7	8	8	
		Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	%	90	90	90	90	90	
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	80	80	80	80	80	
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Prekusor narkotika serta aksi Premanisme	%	20	20	20	20	20	
		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	80	80	80	80	80	

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kota Bengkulu Tahun 2019-2024

2.2 Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) di

tetapkan oleh pimpinan organisasi sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
Tahun 2024

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula	Sumber Data
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
			Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	$\frac{\text{Jumlah LSM/Ormas yang dibina}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda dan Perkada}} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
			Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Prekursor narkotika serta aksi Premanisme	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda dan Perkada}} \times 100\%$	Badan Kesbangpol
			Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	$\frac{\text{Jlh pengguna hak pilih}}{\text{Jlh DP}} \times 100\% : \text{Jlh Jenis Pemilu}$	Badan Kesbangpol

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bengkulu Tahun 2024

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tahun 2024

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
Tahun 2024

Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik”				
Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Presentase Administrasi Perkantoran	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kineja Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya

Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Persentase Ormas/ LSM Yang aktif dalam Pembangunan	90 %	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
				Pelaksanaan Koor dinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah
Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi di daerah
Persentase partisipasi masyarakat di FKDM dalam menjaga keamanan dan ketertiban	90 %	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bengkulu Tahun 2024

2.4 Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah tanggung/jawab kinerja.dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat menerima penerima amanah kepada atasan langsungnya penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah unit/kerja dalam suatu tahun tertentu dengan pertimbangan sumber daya yang dikelolanya. Pemantapan kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (performence agreement) yaitu ikhtisar rencana kinerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya setelah proses anggarannya,

setelah (budgeting process) selesai. Pada Tahun 2024 Perjanjian Kinerja mengalami 3 (tiga) kali perubahan di antaranya Perubahan Anggaran (Refocussing Anggaran), Pergantian Pejabat Eselon II karena Pejabat Eselon II memasuki Masa Pensiun (MPP) sehingga posisi Kepala Badan beralih menjadi Plt. Kepala Badan dan Perubahan Anggaran Pada 20 November 2024. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi pendapatan kinerja dibuat dalam laporan akuntabilitas kinerja. Penetapan Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 beserta tahapan perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
2	Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi	2
3	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	7%
		Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	90%
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Prekursor narkotika serta aksi Premanisme	20%
		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 3.797.824.667
2	Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 29.252.360.550
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 711.061.900
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 65.000.000
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 660.000.000
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Rp. 374.328.800
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 34.860.576.117

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
2	Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi	2
2	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	7%
		Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	90%
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Prekursor narkotika serta aksi Premanisme	20%
		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 4.698.062.240
2	Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 29.369.193.074
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.260.211.900
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 65.000.200
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 660.000.000
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	Rp. 2.055.974.628
	Jumlah Anggaran Tahun 2024	Rp. 38.509.770.842
(Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu merupakan wujud kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa Kota Bengkulu pada Tahun 2024 diukur melalui Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024.

Untuk mengetahui gambaran mengenai persentase capaian kinerja tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel skala dan kategori capaian kinerja berikut ini.

Skala dan Kategori Capaian Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori
$\geq 100 \%$	Sangat Baik
$75 \% \text{ s/d } < 100 \%$	Baik
$55 \% \text{ s/d } < 75 \%$	Cukup Baik

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran Capaian Kinerja di Laksanakan sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2024, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dalam Urusan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam pemahaman ideologi secara umum dapat dikatakan baik. Dalam Pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja belum dapat berjalan secara optimal karena adanya Wabah Covid -19. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut bahwa secara Seluruh Besaran target atas indikator sasaran ada yang belum mencapai 100 Persen.

Analisis capaian kinerja tiap sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja tahun 2024.
Hasil Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	7 %	7 %	100%
	Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	95 %	90 %	99%
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Prekursor narkoba serta aksi Premanisme	20 %	0 %	0%
	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	80 %	76 %	84%

Berdasarkan Tabel 3.1.1 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Presentase Pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik mempunyai target 5 % dan telah terealisasi sebesar 5 % atau 100 % telah mencapai target.
 2. Indikator Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas mempunyai target 95 % dan terealisasi sebesar 90.
 3. Indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Prekursor narkoba serta aksi Premanisme Mempunyai target 20 % dan terealisasi 0 % karena di tahun 2024 tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 4. Indikator Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu mempunyai target 80% dan terealisasi 80 % .
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 secara ringkas di tunjuk oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja		Capaian 2024 (%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	%	7	7	7	100%

Dari Tabel 3.1.2 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Tahun 2023 serta capaian kinerja tahun 2024 berbanding sama atau tercapai 100% Sementara Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dengan volume pencapaian target 100 %.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	7	7	Mencapai Target
2	Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	95	90	Mencapai Target
3.	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	80	80	Mencapai Target
4.	Persentase Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter	80	80	Mencapai Target

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah membandingkan antara target kinerja sasaran dan Realisasi kinerja perangkat daerah atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalannya target kinerja 5 tahun yang direncanakan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan perangkat daerah berdasarkan rencana kinerja tahunan ditetapkan dapat dilihat dengan jelas Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan agar rencana kerja berjalan lancar tanpa hambatan.

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bengkulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Pengukuran Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	7 %	7 %	100%
	Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	95 %	95 %	100%
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Prekursor narkoba serta aksi Premanisme	20 %	0 %	0%
	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu	80 %	80 %	100%

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Indikator Presentase Pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik mempunyai target 7 % dan telah terealisasi sebesar 7 % atau 100 % telah mencapai target.
2. Indikator Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas mempunyai target 95% dan terealisasi sebesar 100% mencapai target.
3. Indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang Menerima Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Prekursor narkoba serta aksi Premanisme Mempunyai target 20 % dan terealisasi 0 % karena di tahun 2024 tidak memiliki anggaran.
4. Indikator Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu mempunyai target 80% dan terealisasi 80 % atau telah 100% telah mencapai target.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Tahun 2023

dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan. Capaian Indikator Kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian Kinerja		Capaian 2024 (%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	%	7	7	7	100%

Pada Indikator persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat capaian kinerja tercapai 100% Tahun 2023 s/d 2024 adalah tahun produktif karena adanya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak Bengkulu khususnya menyebabkan hal tersebut berimbas pada stabilitas keamanan dan perekonomian . Adapun Badan kesatuan Bangsa dan politik kota Bengkulu dalam tupoksinya meningkatkan keamanan dan ketertiban perlindungan masyarakat ikut ambil andil bersama tim Kewaspadaan Dini Kota Bengkulu bersama OPD lainnya dalam rangka percepatan penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kota Bengkulu.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa capaian kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain.

- a. Komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang ada dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- b. Partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan sudah meningkat.
- c. Kemampuan SDM yang dilibatkan dalam menjalani kegiatan – kegiatan yang direncanakan sudah semakin meningkat.

Namun juga banyak capaian kinerja yang tidak berjalan sesuai target kinerja hal ini disebabkan karena akibat pengurangan dana (Refocussing anggaran) .

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut.

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- b. Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil- kecilnya;
- c. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah.

3.5 Realisasi Anggaran

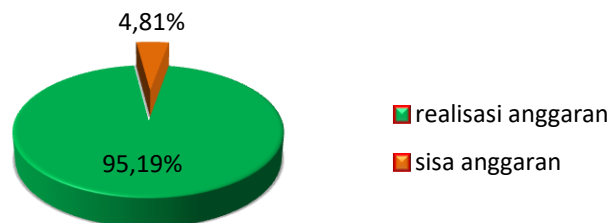
Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dan realisasinya, realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu sebesar RP. 38.509.770.842 dari pagu anggaran Rp.36.659.317.746 atau mencapai 95,19% dari jumlah pagu anggaran dengan rincian sbb :

Uraian	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.026.411.617	3.230.123.000	3.035.804.941	92,17 %
Belanja Barang & Jasa	2.517.693.000	3.386.667.891	1.755.468.625	71,94 %
Belanja Hibah	29.175.284.600	15.909.963.400	15.909.961.400	100 %
Belanja Modal	141.186.900	155.789.200	133.005.000	85,37 %
Jumlah	34.719.389.217	38.509.770.842	36.659.317.746	95.19%

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2024, untuk melaksanakan 6 program 10 kegiatan 22 Sub kegiatan berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.00.41.0000 /001/2024 Tanggal 03 Januari 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.719.389.217 dan DPPA Nomor : DPPA/A.3/8.01.0.00.00.41.0000

/001/2024 Tanggal 27 September 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.509.770.842 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Bengkulu. Pencapaian target yang bersumber dari dana APBD Kota Bengkulu. Pencapaian target kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tahun 2024 dengan anggaran sebesar sebesar RP.36.659.317.746 dari pagu anggaran Rp. 38.509.770.842 atau mencapai 95,15% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.850.453.096 atau 4.85%.

**Realisasi Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu**



Tabel 3.5 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	38.353.981.642	36.526.312.746,00	155.789.200	133.005.000,00	95%
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	38.353.981.642	36.526.312.746,00	155.789.200	133.005.000,00	95%
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu	38.353.981.642	36.526.312.746,00	155.789.200	133.005.000,00	95%
8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.542.273.040	3.956.502.835,00	155.789.200	133.005.000,00	87%
8.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.317.226	99.093.000,00	0	0,00	96%
8.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.317.226	99.093.000,00	0	0,00	96%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.317.226	99.093.000,00	0	0,00	96%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.01	Belanja Barang	35.447.226	31.250.000,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.447.226	31.250.000,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.755.226	21.738.500,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.092.000	5.310.000,00	0	0,00	87%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.600.000	4.201.500,00	0	0,00	55%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.02	Belanja Jasa	67.870.000	67.843.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.870.000	67.843.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.01.0007	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	67.870.000	67.843.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.607.636.342	3.324.986.567,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.367.206.342	3.102.876.567,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.367.206.342	3.102.876.567,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.137.206.342	2.017.749.875,00	0	0,00	94%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.494.471.470	1.421.740.124,00	0	0,00	95%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.494.471.470	1.421.740.124,00	0	0,00	95%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.142.462	134.641.114,00	0	0,00	95%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141.142.462	134.641.114,00	0	0,00	95%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.000.000	165.805.000,00	0	0,00	98%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.000.000	165.805.000,00	0	0,00	98%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.000.000	18.870.000,00	0	0,00	94%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.000.000	18.870.000,00	0	0,00	94%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.326.458	67.857.540,00	0	0,00	95%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	71.326.458	67.857.540,00	0	0,00	95%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	115.000.000	100.499.067,00	0	0,00	87%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	115.000.000	100.499.067,00	0	0,00	87%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.000	18.915,00	0	0,00	76%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	18.915,00	0	0,00	76%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	110.000.000	96.628.392,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	110.000.000	96.628.392,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.500.000	2.922.417,00	0	0,00	65%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.500.000	2.922.417,00	0	0,00	65%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.740.952	8.767.306,00	0	0,00	82%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.740.952	8.767.306,00	0	0,00	82%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.230.000.000	1.085.126.692,00	0	0,00	88%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	652.694.929	626.037.881,00	0	0,00	96%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	652.694.929	626.037.881,00	0	0,00	96%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	289.531.931	231.567.473,00	0	0,00	80%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	289.531.931	231.567.473,00	0	0,00	80%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	287.773.140	227.521.338,00	0	0,00	79%
8.01.01.2.02.0001	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	287.773.140	227.521.338,00	0	0,00	79%
8.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.430.000	222.110.000,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	240.430.000	222.110.000,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.02.0002	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	240.430.000	222.110.000,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.02.0002	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	227.580.000	210.560.000,00	0	0,00	93%
8.01.01.2.02.0002	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	219.420.000	203.080.000,00	0	0,00	93%
8.01.01.2.02.0002	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	7.480.000,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.02.0002	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.850.000	11.550.000,00	0	0,00	90%
8.01.01.2.02.0002	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.850.000	11.550.000,00	0	0,00	90%
8.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	10.860.000,00	0	0,00	60%
8.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	10.860.000,00	0	0,00	60%
8.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	10.860.000,00	0	0,00	60%
8.01.01.2.05.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	18.000.000	10.860.000,00	0	0,00	60%
8.01.01.2.05.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000	10.860.000,00	0	0,00	60%
8.01.01.2.05.0002	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.000.000	1.950.000,00	0	0,00	49%
8.01.01.2.05.0002	5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000	5.960.000,00	0	0,00	60%
8.01.01.2.05.0002	5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.000.000	2.950.000,00	0	0,00	74%
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.707.072	312.443.575,00	132.789.200	110.330.000,00	86%
8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.679.300	11.637.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.679.300	11.637.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.06.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	11.679.300	11.637.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.06.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.679.300	11.637.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.06.0001	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.679.300	11.637.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.713.064	50.303.050,00	132.789.200	110.330.000,00	97%
8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.713.064	50.303.050,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	51.713.064	50.303.050,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.713.064	50.303.050,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000	1.270.000,00	0	0,00	64%
8.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.708.000	36.702.750,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.005.064	12.330.300,00	0	0,00	95%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	132.789.200	110.330.000,00	83%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	22.761.200	22.450.000,00	99%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	22.761.200	22.450.000,00	99%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0	0,00	22.761.200	22.450.000,00	99%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	23.778.000	20.800.000,00	87%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	11.348.800	11.300.000,00	100%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	11.348.800	11.300.000,00	100%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	12.429.200	9.500.000,00	76%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0	0,00	12.429.200	9.500.000,00	76%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	86.250.000	67.080.000,00	78%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	86.250.000	67.080.000,00	78%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	55.500.000	36.580.000,00	66%
8.01.01.2.06.0002	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	30.750.000	30.500.000,00	99%
8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.964.200	44.596.200,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.964.200	44.596.200,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	45.964.200	44.596.200,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.964.200	44.596.200,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	45.964.200	44.596.200,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.999.508	53.867.450,00	0	0,00	79%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.999.508	53.867.450,00	0	0,00	79%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	47.499.508	44.257.450,00	0	0,00	93%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.499.508	44.257.450,00	0	0,00	93%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.951.508	28.941.450,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.548.000	15.316.000,00	0	0,00	83%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	20.500.000	9.610.000,00	0	0,00	47%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000	9.610.000,00	0	0,00	47%
8.01.01.2.06.0005	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.500.000	9.610.000,00	0	0,00	47%
8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.351.000	152.039.875,00	0	0,00	81%
8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.351.000	152.039.875,00	0	0,00	81%
8.01.01.2.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	187.351.000	152.039.875,00	0	0,00	81%
8.01.01.2.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	187.351.000	152.039.875,00	0	0,00	81%
8.01.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.351.000	152.039.875,00	0	0,00	81%
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.027.400	139.425.543,00	0	0,00	93%
8.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.811.000	3.802.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.811.000	3.802.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.08.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	3.811.000	3.802.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.08.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.811.000	3.802.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.08.0001	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.811.000	3.802.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.000.000	64.821.943,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000	64.821.943,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.08.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	74.000.000	64.821.943,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	74.000.000	64.821.943,00	0	0,00	88%
8.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.000.000	9.215.900,00	0	0,00	92%
8.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.000.000	2.182.400,00	0	0,00	55%
8.01.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	60.000.000	53.423.643,00	0	0,00	89%
8.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.050.000	16.510.000,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000	16.510.000,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.08.0003	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.050.000	16.510.000,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.08.0003	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.050.000	16.510.000,00	0	0,00	97%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.01.2.08.0003	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000	6.000.000,00	0	0,00	98%
8.01.01.2.08.0003	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	10.510.000,00	0	0,00	96%
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.166.400	54.291.600,00	0	0,00	98%
8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.166.400	54.291.600,00	0	0,00	98%
8.01.01.2.08.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	55.166.400	54.291.600,00	0	0,00	98%
8.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.000.000	54.000.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.000.000	54.000.000,00	0	0,00	100%
8.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.166.400	291.600,00	0	0,00	25%
8.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	518.400	135.000,00	0	0,00	26%
8.01.01.2.08.0004	5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	648.000	156.600,00	0	0,00	24%
8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.585.000	69.694.150,00	23.000.000	22.675.000,00	23%
8.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.535.000	69.694.150,00	0	0,00	56%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.535.000	69.694.150,00	0	0,00	56%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	41.115.000	33.590.000,00	0	0,00	82%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.115.000	33.590.000,00	0	0,00	82%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.100.000	27.750.000,00	0	0,00	79%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.015.000	5.840.000,00	0	0,00	97%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	32.800.000	8.632.700,00	0	0,00	26%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	32.800.000	8.632.700,00	0	0,00	26%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	32.800.000	8.632.700,00	0	0,00	26%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	49.620.000	27.471.450,00	0	0,00	55%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.620.000	27.471.450,00	0	0,00	55%
8.01.01.2.09.0001	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	49.620.000	27.471.450,00	0	0,00	55%
8.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.050.000	0,00	23.000.000	22.675.000,00	0%
8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.01.2.09.0009	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	175.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.01.2.09.0009	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	175.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.01.2.09.0009	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	175.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	23.000.000	22.675.000,00	99%
8.01.01.2.09.0009	5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	9.000.000	8.800.000,00	98%
8.01.01.2.09.0009	5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	9.000.000	8.800.000,00	98%
8.01.01.2.09.0009	5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	0,00	9.000.000	8.800.000,00	98%
8.01.01.2.09.0009	5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0,00	14.000.000	13.875.000,00	99%
8.01.01.2.09.0009	5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0	0,00	14.000.000	13.875.000,00	99%
8.01.01.2.09.0009	5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0	0,00	14.000.000	13.875.000,00	99%
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.260.211.900	1.111.870.125,00	0	0,00	88%
8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.260.211.900	1.111.870.125,00	0	0,00	88%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.02.2.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.182.582.700	1.096.942.230,00	0	0,00	93%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.582.700	1.096.942.230,00	0	0,00	93%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	324.193.199	287.560.000,00	0	0,00	89%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	324.193.199	287.560.000,00	0	0,00	89%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.000.900	7.700.000,00	0	0,00	77%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.272.484	6.260.000,00	0	0,00	56%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.500.000	2.465.000,00	0	0,00	99%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	618.000	400.000,00	0	0,00	65%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.896.000	10.800.000,00	0	0,00	99%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.254.000	2.254.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	156.711.400	131.551.000,00	0	0,00	84%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	129.940.415	126.130.000,00	0	0,00	97%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	294.484.900	260.194.000,00	0	0,00	88%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	180.724.900	146.824.000,00	0	0,00	81%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	106.350.000	95.700.000,00	0	0,00	90%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.000.000	18.000.000,00	0	0,00	86%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	53.374.900	33.124.000,00	0	0,00	62%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.360.000	7.120.000,00	0	0,00	97%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.600.000	1.600.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.760.000	1.520.000,00	0	0,00	86%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70.400.000	70.250.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	64.400.000	64.250.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000	36.000.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	36.000.000	36.000.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.652.601	50.188.230,00	0	0,00	86%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.652.601	50.188.230,00	0	0,00	86%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.652.601	50.188.230,00	0	0,00	86%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	505.252.000	499.000.000,00	0	0,00	99%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	505.252.000	499.000.000,00	0	0,00	99%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	135.002.000	135.000.000,00	0	0,00	100%
8.01.02.2.01.0001	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	370.250.000	364.000.000,00	0	0,00	98%
8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	77.629.200	14.927.895,00	0	0,00	19%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.629.200	14.927.895,00	0	0,00	19%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	8.905.200	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.905.200	0,00	0	0,00	0%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.699.200	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	206.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	47.500.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.600.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.400.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.400.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.500.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.224.000	14.927.895,00	0	0,00	70%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.224.000	14.927.895,00	0	0,00	70%
8.01.02.2.01.0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.224.000	14.927.895,00	0	0,00	70%
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	29.396.193.074	29.340.240.989,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	29.396.193.074	29.340.240.989,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003		<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	28.065.427.600	28.065.427.600,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	28.065.427.600	28.065.427.600,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003	5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.865.268.000	5.865.268.000,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003	5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.865.268.000	5.865.268.000,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003	5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.865.268.000	5.865.268.000,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.200.159.600	22.200.159.600,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.200.159.600	22.200.159.600,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0003	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.200.159.600	22.200.159.600,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0005		<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	1.330.765.474	1.274.813.389,00	0	0,00	96%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.673.224	100.721.139,00	0	0,00	64%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	7.112.224	3.755.000,00	0	0,00	53%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.112.224	3.755.000,00	0	0,00	53%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.352.224	1.995.000,00	0	0,00	37%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000	1.760.000,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	74.668.000	47.608.000,00	0	0,00	64%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	65.620.000	47.608.000,00	0	0,00	73%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.000.000	29.500.000,00	0	0,00	95%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.570.000	18.108.000,00	0	0,00	66%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.848.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.848.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.200.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.200.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.893.000	49.358.139,00	0	0,00	66%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.893.000	49.358.139,00	0	0,00	66%
8.01.03.2.01.0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.893.000	49.358.139,00	0	0,00	66%
8.01.03.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	1.174.092.250	1.174.092.250,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0005	5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.174.092.250	1.174.092.250,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0005	5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.174.092.250	1.174.092.250,00	0	0,00	100%
8.01.03.2.01.0005	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.174.092.250	1.174.092.250,00	0	0,00	100%
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	65.000.200	5.765.397,00	0	0,00	9%
8.01.04.2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>65.000.200</i>	<i>5.765.397,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>9%</i>
8.01.04.2.01.0004		<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	<i>50.000.000</i>	<i>5.765.397,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>12%</i>
8.01.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	5.765.397,00	0	0,00	12%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	9.765.700	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.765.700	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.047.700	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	615.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	103.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	26.808.300	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.158.300	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.158.300	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.250.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	8.250.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.426.000	5.765.397,00	0	0,00	43%
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.426.000	5.765.397,00	0	0,00	43%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.04.2.01.0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.426.000	5.765.397,00	0	0,00	43%
8.01.04.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.000.200	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.200	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	1.950.200	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.950.200	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.744.200	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	206.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.04.2.01.0005	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.050.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	660.000.000	493.769.820,00	0	0,00	75%
8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	660.000.000	493.769.820,00	0	0,00	75%
8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	525.000.000	458.784.820,00	0	0,00	87%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000	458.784.820,00	0	0,00	87%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	111.852.000	103.652.000,00	0	0,00	93%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	111.852.000	103.652.000,00	0	0,00	93%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.944.600	3.156.000,00	0	0,00	53%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.104.400	5.050.000,00	0	0,00	83%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	927.000	510.000,00	0	0,00	55%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.876.000	94.936.000,00	0	0,00	96%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	382.155.000	331.515.000,00	0	0,00	87%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	206.850.000	186.000.000,00	0	0,00	90%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	134.250.000	134.250.000,00	0	0,00	100%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.600.000	51.750.000,00	0	0,00	71%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	175.305.000	145.515.000,00	0	0,00	83%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	175.305.000	145.515.000,00	0	0,00	83%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.993.000	23.617.820,00	0	0,00	76%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.993.000	23.617.820,00	0	0,00	76%
8.01.05.2.01.0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.993.000	23.617.820,00	0	0,00	76%
8.01.05.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	135.000.000	34.985.000,00	0	0,00	26%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	34.985.000,00	0	0,00	26%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	15.576.000	6.525.000,00	0	0,00	42%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.576.000	6.525.000,00	0	0,00	42%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.765.800	5.375.000,00	0	0,00	42%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.460.000	800.000,00	0	0,00	33%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.200	350.000,00	0	0,00	100%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	81.730.000	28.460.000,00	0	0,00	35%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.800.000	9.800.000,00	0	0,00	41%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.800.000	9.800.000,00	0	0,00	41%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.380.000	11.160.000,00	0	0,00	32%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.380.000	11.160.000,00	0	0,00	32%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.550.000	7.500.000,00	0	0,00	32%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	23.550.000	7.500.000,00	0	0,00	32%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.694.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.694.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.694.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.05.2.01.0005	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.430.303.428	1.618.163.580,00	0	0,00	67%
8.01.06.2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	2.430.303.428	1.618.163.580,00	0	0,00	67%
8.01.06.2.01.0003		<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	1.601.382.388	1.073.285.288,00	0	0,00	67%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.382.388	1.073.285.288,00	0	0,00	67%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	262.170.388	258.657.788,00	0	0,00	99%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	262.170.388	258.657.788,00	0	0,00	99%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	259.377.788	258.657.788,00	0	0,00	100%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.792.600	0,00	0	0,00	0%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.339.212.000	814.627.500,00	0	0,00	61%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	451.200.000	265.050.000,00	0	0,00	59%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	451.200.000	265.050.000,00	0	0,00	59%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	527.724.000	329.827.500,00	0	0,00	63%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	527.724.000	329.827.500,00	0	0,00	63%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	360.288.000	219.750.000,00	0	0,00	61%
8.01.06.2.01.0003	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	360.288.000	219.750.000,00	0	0,00	61%
8.01.06.2.01.0004		<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	24.240.000	24.178.738,00	0	0,00	100%
8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000	24.178.738,00	0	0,00	100%
8.01.06.2.01.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.240.000	24.178.738,00	0	0,00	100%

Kode Rekening		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				
			Operasi		Modal		%
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
8.01.06.2.01.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.240.000	24.178.738,00	0	0,00	100%
8.01.06.2.01.0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.240.000	24.178.738,00	0	0,00	100%
8.01.06.2.01.0005		<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	189.305.000	76.350.000,00	0	0,00	40%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.305.000	76.350.000,00	0	0,00	40%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	9.600.000	4.500.000,00	0	0,00	47%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.600.000	4.500.000,00	0	0,00	47%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	4.500.000,00	0	0,00	47%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	86.800.000	63.750.000,00	0	0,00	73%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	86.800.000	63.750.000,00	0	0,00	73%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.800.000	63.750.000,00	0	0,00	73%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	92.905.000	8.100.000,00	0	0,00	9%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.905.000	8.100.000,00	0	0,00	9%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.905.000	0,00	0	0,00	0%
8.01.06.2.01.0005	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	8.100.000,00	0	0,00	90%
8.01.06.2.01.0006		<i>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	615.376.040	444.349.554,00	0	0,00	72%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.376.040	444.349.554,00	0	0,00	72%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	38.012.040	16.418.800,00	0	0,00	43%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.012.040	16.418.800,00	0	0,00	43%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.112.040	6.918.800,00	0	0,00	97%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.900.000	9.500.000,00	0	0,00	31%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.02	Belanja Jasa	322.328.000	232.904.000,00	0	0,00	72%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	279.928.000	190.504.000,00	0	0,00	68%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	201.150.000	133.600.000,00	0	0,00	66%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.900.000	45.000.000,00	0	0,00	90%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	28.878.000	11.904.000,00	0	0,00	41%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	42.400.000	42.400.000,00	0	0,00	100%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	42.400.000	42.400.000,00	0	0,00	100%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	255.036.000	195.026.754,00	0	0,00	76%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	255.036.000	195.026.754,00	0	0,00	76%
8.01.06.2.01.0006	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	255.036.000	195.026.754,00	0	0,00	76%
		Jumlah	38.353.981.642	36.526.312.746,00	155.789.200	133.005.000,00	95,19%

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

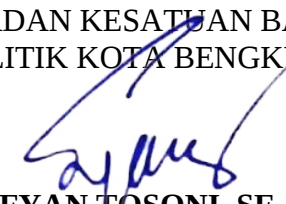
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan sasaran strategis organisasi kepada para pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali alat penilaian kualitas kinerja alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, maka (LKjIP) ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public. Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2024 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai walaupun belum optimal. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang dicapai belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu:

1. Hambatan yang bersifat politis, yang diakibatkan kondisi heterogenitas masyarakat Kota Bengkulu yang cenderung dinamis.
2. Hambatan yang bersifat teknis diantaranya kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kurangnya sarana dan prasarana.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dinas/instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat kecamatan dan kelurahan dalam kota Bengkulu.

Bengkulu, 28 Febuari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BENGKULU



SYOFYAN TOSONI, SE, M.SI

Pembina (IV.c)

Nip.19700902 199303 1 006